

NILAI KEJUANGAN DAN KEBANGSAAN RAKYAT ACEH DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

The Value of the Struggle and Nationality of the People of Aceh in Maintaining the Sovereignty of the United State of the Republic of Indonesia

Rudi Lazuardi¹, Riduan², Iramdan³

^{1,2} Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jalan Ciledug Raya No. 2, Komplek Seskoal,
RT.4/RW.11

Cipulir, Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12230, Indonesia

³ Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Nangka Raya No.58 C, RT.5/RW.5, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530, , Indonesia

Email: rudilazu@gmail.com

ABSTRAK: Dalam penelitian ini adalah konflik Aceh yang terjadi berkepanjangan hingga beberapa dekade. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif secara deskriptif analitis serta survey. Untuk mengukur parameter yang paling berpengaruh dilakukan pengolahan data Regresi Linier menggunakan Program SPSS. Penelitian dilakukan di Banda Aceh, Aceh Pidie, Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Lhokseumawe sejumlah 31 responden. Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata keseluruhan parameter adalah 0.760 yang bermakna nilai-nilai perjuangan dan kebangsaan pulih kembali yang merupakan buah dari Perjanjian Perdamaian Helsinki. tiga parameter yang paling berpengaruh pada nilai Perjuangan adalah Peduli Keamanan Lingkungan, Semangat Berkorban bagi Negara dan Menumbuhkan Semangat Perjuangan sedangkan tiga parameter yang paling berpengaruh pada nilai Kebangsaan adalah Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah, Penghayatan Nilai Agama dan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Kata kunci: Nilai perjuangan, Nilai kebangsaan, Aceh, Perjanjian Helsinki, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ABSTRACT: The study in this research is the Aceh conflict that has lasted for decades. The research method used is quantitative and qualitative methods with analytical descriptive and survey. To measure the most influential parameter, Linear Regression data processing was carried out using the SPSS program. The research was conducted in Banda Aceh, Aceh Pidie, Central Aceh, Bener Meriah and Lhokseumawe districts with a total of 31 respondents. The result of this research is that the average value of all parameters is 0.760, which means that the values of struggle and nationality have recovered, which is the fruit of the Helsinki Peace Agreement. the three parameters that have the most influence on the value of struggle are Concern for Environmental Security, the Spirit of Sacrifice for the State and Fostering the Spirit of Fighting, while the three parameters that have the most influence on the value of Nationality Support for Government Policies, Appreciation of Religious Values and Pancasila as the National Ideology.

Keywords: Struggle values, National values, Aceh, the Helsinki Agreement, the Unitary State of the Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang letaknya berada pada posisi strategis antara dua benua (Asia-Australia) diapit oleh dua samudera (Pasifik-Hindia). Dengan letak geografisnya yang strategis tersebut, tentu tidaklah mudah untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, karena dengan luas wilayah perairan 3.25 juta km² terdiri dari laut teritorial 0,3 km², perairan kepulauan 2,95 juta km², ZEE 2,55 km (Staf Operasi Mabes TNI, 2014), memberi kemungkinan masuknya pengaruh asing untuk menghancurkan bangsa Indonesia melalui: ideologi, sosial budaya, kejahatan lintas negara (*transnational crime*), tentu semua ini dapat menghancurkan bangsa dan kedaulatan negara. Selain itu di Indonesia pernah terjadi konflik-konflik di berbagai wilayah seperti: Aceh, Papua, konflik komunal di Poso, Kalimantan, Sambas dan Sampit merupakan perjalanan pahit yang dilalui bangsa ini dalam menjaga keutuhan NKRI.

Salah satu konflik yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah konflik Aceh yang terjadi berkepanjangan hingga beberapa dekade. Kajian ini menjadi menarik terkait dengan nilai kejuangan dan kebangsaan masyarakat Aceh sendiri karena sebagaimana faktor sejarah mencatat bahwa nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan masyarakat Aceh sejatinya sudah ada sejak masa mempertahankan kemerdekaan salah satunya melalui istilah "Aceh Daerah Modal" dalam menghadapi agresi Belanda untuk kembali mencengkeramkan kuku penjajahan di Bumi Pertiwi ini (Abdullah Sani Usman, 2010). Namun, kebijakan pemerintah yang

dirasakan tidak adil oleh masyarakat Aceh telah menimbulkan konflik yang telah merusak nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol-simbol separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terasa lebih kuat dibanding rasa nasionalisme Indonesia yang ditampilkan melalui bendera GAM, fenomena lain adalah tidak adanya upacara peringatan hari Kemerdekaan 17 Agustus, lalu pudarnya dasar negara Pancasila serta lagu kebangsaan Indonesia Raya

Bersyukurlah, konflik yang menimbulkan kesedihan dan penderitaan dari kedua belah pihak telah berakhir melalui perjanjian perdamaian antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (MoU)*, di Helsinki pada 15 Agustus 2005 (M. Yusuf Al-Qardhawy, M Adwani, M. Nur Rasyid, 2014). Kemudian langkah-langkah yang telah disepakati dalam MoU adalah menyediakan landasan untuk mengakhiri permusuhan dan membangun keyakinan dan kepercayaan di antara kedua pihak (Daly, P. dkk, 2012). Pasca perdamaian, pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk fokus pada pembangunan kepercayaan demi menatap masa depan masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya.

Selain dari faktor kesejahteraan sebagai akar masalah, maka nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan masyarakat Aceh perlu diwariskan kepada generasi muda yang mengalami pemutusan mata rantai akibat konflik, sementara peran pemerintah daerah yang notabene mayoritas eks-GAM belum signifikan dalam

pewarisan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan tersebut. Pelemahan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan juga terjadi melalui pelemahan karakter manusia lewat narkoba juga sangat menonjol melalui penyelundupan narkoba. Komoditas tersebut diperkirakan lebih menguntungkan dan diperkirakan kebiasaan ini diturunkan dari anggota GAM menjual ganja untuk membiayai gerakan tersebut (Pitakasari, 2012).

Relevansi dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Mujib, Irwan Abdullah dan Heru Nugroho, (2014) berjudul "Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh dari Dalam Reaktualisasi Ruang Publik bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik dan Tsunami", hasil penelitian mereka berupa pembahasan peran *meunasah* dalam melestarikan nilai kejuangan bagi masyarakat Aceh sebagai *cultural center*; sebagai tempat untuk memecahkan berbagai persoalan kemasyarakatan, dan *meunasah* sebagai *educational center* yang terkait dengan proses pendidikan anak-anak. Dalam penelitian ini dibahas mesjid dan meunasah merupakan suatu lembaga peribadatan, juga sebagai pusat pendidikan Islam dan peradaban yang sangat berperan pasca terjadinya konflik dan tsunami yang juga diakhiri oleh perjanjian perdamaian Helsinki.

Hasil penelitian relevan lainnya dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eko A Meinarno dan Sri Fatmawati Mashoedi (2016), yang membahas tentang Upaya untuk menumbuhkan Kesadaran Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak lain adalah karena adanya kesadaran akan kesadaran berbangsa dan bernegara atau kesadaran sebagai warga negara. Korelasi yang positif dan signifikan pada semua nilai

Pancasila dan rasa kewarganegaraan memberikan relevansi atas signifikansi upaya untuk menumbuhkan Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah. Selain itu, Di tengah majunya perekonomian di suatu negara atau wilayah atau daerah, maka semakin banyak jumlah uang dan barang/jasa yang beredar di suatu negara (Ariwibowo, 2016).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menjadi penting untuk dikaji seberapa besar nilai kejuangan dan kebangsaan masyarakat Aceh khususnya Pasca DOM/tsunami dan pasca Perundingan Helsinki, faktor-faktor apa sajakah yang paling dominan mempengaruhi nilai-nilai kejuangan/kebangsaan masyarakat Aceh tersebut serta bagaimana mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan masyarakat Aceh tersebut.

METODA

Penelitian ini merupakan metode penelitian survei sedangkan metodenya adalah kuantitatif dan kualitatif secara deskriptif analitis untuk mengetahui seberapa besar nilai Kejuangan dan Kebangsaan Masyarakat Aceh dalam menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian dilakukan Provinsi Aceh meliputi: Banda Aceh, Aceh Pidie, Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Lhokseumawe dengan total sampel berjumlah 30 responden yang merupakan perwakilan masyarakat meliputi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta perwakilan komponen-komponen masyarakat. Pemilihan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewakili masing-masing profesi, usia dan kelompok masyarakat di Tahuna. Sebaran usia responden meliputi di atas 15 tahun hingga di bawah 55 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Kuantitatif

Uji Validitas.

Peduli Keamanan Lingkungan

Dari 4 Item pertanyaan mengenai Peduli Keamanan Lingkungan (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing adalah 0.877, 0.742, 0.736 dan 0.829 semuanya lebih besar dari r_{tabel} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, maka semua pertanyaan adalah valid.

Semangat Berkorban bagi Negara

Dari 4 Item pertanyaan mengenai Semangat Berkorban bagi Negara (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing adalah 0.609, 0.771, 0.590 dan 0.628 semuanya lebih besar dari r_{tabel} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, maka semua pertanyaan adalah valid.

Sikap Cinta Tanah Air

Dari 5 Item pertanyaan mengenai Sikap Cinta Tanah Air (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing adalah 0.635, 0.691, 0.688, 0.739 dan 0.531 semuanya lebih besar dari r_{tabel} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, maka semua pertanyaan adalah valid

Menjaga nama Baik Bangsa

Dari 4 Item pertanyaan mengenai Menjaga nama Baik Bangsa (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing adalah 0.461, 0.459, 0.471, dan 0.086 semuanya lebih besar dari r_{tabel} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, kecuali untuk Item 4 nilai r_{hitung} adalah 0.086 maka pertanyaan Item-1 hingga Item-4 adalah valid dan pertanyaan Item-4 tidak Valid.

Berkontribusi bagi Kemajuan Bangsa

Dari 4 Item pertanyaan mengenai Berkontribusi bagi Kemajuan Bangsa (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing adalah 0.818, 0.906, 0.857, dan 0.742

semuanya lebih besar dari r_{tabel} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, maka semua pertanyaan adalah valid.

Bangga Menjadi bangsa Indonesia

Dari 4 Item pertanyaan mengenai Bangsa Menjadi bangsa Indonesia (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing adalah 0.531, 0.673, 0.632, dan 0.608 semuanya lebih besar dari r_{tabel} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, maka semua pertanyaan adalah valid.

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Dari 6 Item pertanyaan mengenai Pancasila sebagai Ideologi Bangsa (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing adalah 0.671, 0.270, 0.380, 0.684, 0.697 dan 0.535 semuanya lebih besar dari r_{tabel} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, kecuali Item-2 dengan r_{hitung} 0.270 maka semua pertanyaan adalah valid kecuali pertanyaan Item-3.

Penghayatan Nilai Agama

Dari 6 Item pertanyaan mengenai Penghayatan Nilai Agama (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing adalah 0.587, 0.561, 0.636, 0.586 dan 0.523 semuanya lebih besar dari r_{tabel} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, maka semua pertanyaan adalah valid.

Dukungan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Dari 6 Item pertanyaan mengenai Dukungan Terhadap Kebijakan Pemerintah (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing adalah 0.731, 0.652, 0.823, 0.804, 0.704 dan 0.785 semuanya lebih besar dari r_{hitung} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, maka semua pertanyaan adalah valid.

Menumbuhkan Semangat Kejuangan

Dari 7 Item pertanyaan mengenai Menumbuhkan Semangat Kejuangan (perhitungan Validitas terdapat pada lampiran) maka nilai r_{hitung} masing masing

adalah 0.704, 0.352, 0.628, 0.582, 0.646, 0.499 dan 0.666 semuanya lebih besar dari r_{hitung} untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, maka semua pertanyaan adalah valid.

Uji Reliabilitas.

Nilai Cronbach's alpha untuk semua parameter $r_{hitung} > r_{tabel}$ untuk $n = 31$ dan derajat signifikansi 0.05 adalah 0.344, maka instrumen adalah reliabel (perhitungan Reliabilitas terdapat pada lampiran).

Dalam analisis ini dilakukan Uji-F, dan diperoleh F_{tabel} untuk $df_1 = 1$ dan df penyebut adalah $df_2 = 239 - 2 = 237$ maka $F_{tabel} = 3.88$. Seluruh parameter memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}^1$, kecuali parameter Berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan Kebangsaan. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan secara keseluruhan adalah baik, atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X beserta *intercept*-nya.

Hasil Penelitian Kualitatif

Wawancara dengan Pangdam Iskandar Muda (IM) yang diwakili Asisten Teritorial Kodam IM, Kolonel Inf. Mahesa Fitriadi, S.A.P.

Setelah berakhirnya konflik di Aceh yang ditandai dengan MOU Helsinki yang merupakan kesepakatan bersama yang melahirkan perdamaian di Aceh yang ditandatangani oleh pemimpin GAM dan perwakilan pemerintah RI di Helsinki Finlandia, 15 Agustus 2005, maka masyarakat Aceh perlu dihilangkan paradigma mantan anggota GAM dan hal-hal lain yang menjadi trauma atas konflik yang berkepanjangan selama lebih kurang tiga dekade. Selanjutnya tanggal peringatan MoU Helsinki tersebut ditetapkan sebagai hari Damai Aceh.

Budaya gotong royong tersebut menjadi hilang karena saat itu orang membersihkan halaman rumahnya pun

dibayar oleh NGO. Salah satu upaya yang dilakukan oleh TNI adalah dengan melakukan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilakukan oleh wilayah-wilayah Kodim di Aceh. Program ini dinilai dapat membangun semangat gotong royong, hingga tercipta peningkatan kondisi sosial dalam hal wawasan kebangsaan, ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan itu juga melibatkan aparat pemerintah daerah setempat termasuk kadangkala oleh Bupati setempat. TMMD merupakan salah satu kegiatan bentuk kepedulian dan kebersamaan TNI dan rakyat dalam akselerasi pembangunan desa. Dalam kegiatan tersebut Bupati meminta seluruh elemen untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan desa untuk mendorong tumbuhnya prakasa dan swadaya masyarakat secara aktif dalam pembangunan, serta mengembalikan budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Lokasi TMMD umumnya dipilih merupakan daerah terpencil atau pelosok yang jauh dari sentuhan teknologi.

Wawancara dengan kapolda Aceh yang diwakili oleh Wakapolda Aceh Brigjen Pol Drs. Supriyanto Tarah, M.M.

Brigjen Yanto Tarah, panggilan akrabnya, sebelum menjabat sebagai Wakapolda Aceh memiliki pengalaman yang cukup lama di Aceh, mengingat sebelumnya pernah berdinis sebagai Kapolres Bireun. Keberhasilannya memelihara perdamaian di Aceh pasca MoU Helsinki sesungguhnya tidak lepas dari pendekatan kemanusiaan dengan maksud untuk menarik simpati para mantan GAM termasuk tokoh-tokohnya. Pemeliharaan keamanan tersebut dilakukan sesuai amanat Presiden bahwa kondisi Aceh pasca konflik harus aman tanpa kecuali. Pendekatan kemanusiaan tersebut dilakukan mengingat konflik di Aceh yang berkepanjangan antara lain disebabkan karena selama ini pendekatan keamanan dan kekerasan pada saat diberlakukannya DOM justru

menimbulkan trauma dan dendam yang diwariskan pada generasi yang lebih muda.

Untuk mengembalikan nilai-nilai kejuangan bagi masyarakat Aceh maka menurut Wakapolda adalah maka langkah ke depan, harus TNI - Polri sebagai dinamisatornya. Kegiatan upacara 17-an, karnaval kejuangan bertemakan kepahlawanan nasional, berbawa bambu runcing, lomba-lomba, *talkshow* dan sebagainya. Tetapi semua itu harus digerakkan oleh TNI - Polri. Pemda cenderung ke mantan-mantan GAM. Pemerintah tidak bisa melarang pada 4 Desember yang merupakan hari Ulang Tahun GAM yang besar kemungkinan terjadi pengibaran bendera GAM. Disini diperlukan ketegasan pemerintah pusat.

Wawancara dengan Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan bidang Kesejahteraan, Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M. Hum.

Gejolak masyarakat Aceh terjadi dalam beberapa fase yaitu gejolak kemerdekaan yang dimulai dari keinginan untuk mengelola wilayah Aceh sendiri yang dipimpin oleh Daud Cumbok. Melalui tokoh dan pejuang Aceh, M. Nur El Ibrahimy, Daud Cumbok digempur dan kalah. Dalam sejarah, perang ini dinamakan perang saudara atau Perang Cumbok yang menewaskan tak kurang 1.500 orang terjadi selama setahun hingga 1946. Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Saat itulah, M. Daud Beureueh ditunjuk sebagai Gubernur Militer Aceh. Daud Beureueh ingin pengakuan hak menjalankan agama di Aceh dalam kebebasan menjalankan agamanya sesuai syariat Islam. Daud Beureueh pun menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia pada April 1953. Ide ini di Jawa Barat telah diusung Kartosuwiryo pada 1949 melalui Darul Islam. Lima bulan kemudian, Beureueh menyatakan bergabung dan

mengakui NII Kartosuwiryo. Dari sinilah lantas Beureueh melakukan gerilya. Rakyat Aceh, yang notabene Islam, mendukung sepenuhnya ide NII itu. Tentara NII pun dibentuk, bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Lantas, terkenallah pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah. Gerilya terus dilakukan dan Bung Karno mengerahkan tentaranya ke Aceh hingga pada tahun 1962, Beureueh dibujuk menantunya El Ibrahimy agar menuruti Menhankam Jenderal A.H. Nasution untuk menyerah dan Beureueh menurut karena ada janji akan dibuatkan UU Syariat Islam bagi rakyat Aceh.

Konflik Aceh terus berkejolak sejak Presiden Soeharto, B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan terakhir pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, konflik antara pemerintah Indonesia dan Aceh dapat diselesaikan melalui nota kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (MoU Helsinki). Dengan diberikannya otonomi khusus Aceh melalui dasar nota kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (perjanjian *Helsinki*) yang dirasa akan menghentikan gejolak *separatisme* memang dirasa berhasil Rekonsiliasi merupakan langkah alternatif yang diambil dalam menghadapi banyaknya pertikaian seperti di daerah Aceh ini. Dalam kerangka penyelesaian masalah Aceh di masa Orde Baru pemerintah pusat seringkali melakukan kebijakan militeristik yang *represif*. Namun, setelah masa reformasi pemerintah pusat mencoba menyelesaikan masalah ini dengan upaya dialog yang membuahkan hasil pada masa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan wakil Presiden dalam menangani konflik ini. Oleh karenanya, kearifan dan kerendahan hati para pemimpin sebagaimana yang ditunjukkan oleh Muhammad Jusuf Kalla menjadi penting dan menentukan bagi terwujudnya proses perdamaian di Aceh.

Ada perspektif UU Negara tahun 1974, telah pengaruh, pada tahun 1998, terjadi gejolak reformasi berupa *people power* yang mendorong lahirnya UU no 22

tahun 1999 yang dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. UU No.22 tahun 1999 membawa perubahan yang sangat fundamental mengenai mekanisme hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Perubahan yang jelas adalah mengenai pengawasan terhadap Daerah. Yang sebelumnya eksekutif begitu kuat menjadi legislatif yang menjadi lebih kuat.

Wawancara dengan Bupati Aceh Tengah Drs. Shabela Abubakar

Pemikiran orang Aceh kadang membangga-banggakan masa lalu. Aceh sejak lama berhubungan dengan Spanyol, Arab, dan Turki. Dalam hal semangat juang mereka adalah komunitas yang belum pernah dijajah namun banyak yang menjadi korban pada tahun 1965 dengan jumlah sangat besar. Guru-guru dan orang pandai yang seharusnya bisa memajukan pendidikan untuk anak-anak Gayo dibantai dan jumlah korban diperkirakan mencapai 2500. orang. Sementara jumlah penduduk Aceh Tengah pada saat itu hanya 25.000 orang.

Tentang masalah kejuangan, memang telah terjadi pergeseran pola hidup setelah DOM maka nilai kejuangan dan toleransi berkurang. Di Aceh ini meskipun situasi sudah kondusif maka masih ada kegiatan "Perdamaian" antara TNI – GAM. Padahal itu sudah tidak perlu lagi. Karena hal itu masih akan seolah masih ada saling curiga di antara pemerintah dan eks-GAM. Satu hal lagi yang perlu dibahas adalah Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang disinyalir mengadu domba antara masyarakat Aceh dan pemerintah. Bagi masyarakat Aceh apa yang ada di UUPA akan dilaksanakan, tetapi oleh pemerintah diulur-ulur tidak ada penyelesaian misalkan masalah bendera, hymne dan lain-lain.

Meningkatkan nilai kejuangan dengan pelajaran Bahasa Gayo menjadi muatan lokal, terus penulis tentang Gayo, dengan mengambil buku di Belanda. Lalu

perlu digalakkan Krawang Gayo, seperti tas, lukisannya, penari gajah. Gajah putih lambang Kodam, khas Gayo yang menceritakan gajah yang marah lalu dinyanyikan lagu. Semangat gotong royong sudah terkikis tetapi tidak parah (seperti gotong royong membangun masjid) pada Jumat pagi. Pada hari Jumlat tersebut bisa dilaksanakan gotong royong karena tidak ada kegiatan (persiapan shalat). Sebagaimana Jumat bersih itu adalah idenya Presiden Soeharto. Demikian juga, Bung Karno itu santri. Mencintai Bahasa dan negeri melalui seni, menyatukan berbagai suku dengan kesadaran mereka melalui ajakan toleransi yang tinggi karena seluruh suku diayomi dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, melalui kebersamaan.

Wawancara dengan Walikota Lhokseumawe yang diwakili oleh Wakil Walikota Lhokseumawe Yusuf Muhammad, S.E., M.S.M.

Persoalan konflik di Aceh yang berkepanjangan sesungguhnya suatu kejadian yang memberikan suatu hikmah untuk membentuk ketahanan masyarakat yang lebih kuat, karena masyarakat Aceh agak unik, jika ada sesuatu yang diminta tidak dipenuhi/direspons sesuai yang diinginkan, maka di daerah lain cukup menanggapi dengan berdemonstrasi, di Aceh (karena belum pernah terjajah) maka rakyat Aceh sanggup angkat senjata melawan ketidakadilan tersebut.

Tahun 1990, pemerintah menetapkan operasi jaring merah di BP7, sebagai pengusaha saat diminta memberikan masukan supaya Aceh tidak bergejolak disarankan untuk menggunakan cara persuasif, berupa dukungan ekonomi kepada masyarakat Aceh mengingat masyarakat Aceh masih terbelakang sehingga perlu dibangun dalam aspek ekonomi, dan sosial sehingga menjadi maju.

Saran itu menjadi sia-sia karena pada kenyataannya pemerintah sudah punya agenda tersendiri yaitu pemerintah menginginkan operasi militer yang selanjutnya dilaksanakan yang dikenal

dengan nama Operasi Jaring Merah yang merupakan operasi kontra-pemberontakan pada awal 1990-an sampai tahun 1998 untuk gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Padahal dengan dilaksanakannya operasi militer maka perdamaian menjadi tidak kunjung terjadi bahkan terjadi perang yang lebih besar karena masyarakat Aceh tetap melawan, meskipun pada akhirnya perang diakhiri melalui jalan perundingan secara damai pada MoU Helsinki.

Setelah konflik usai melalui MoU Helsinki maka terjadilah kesatuan Indonesia lebih kuat. Sebenarnya tidak ada orang Aceh ingin berpisah dengan republik, yang ada adalah masyarakat Aceh ingin agar permasalahan diselesaikan. Setelah perdamaian itu bisa terwujud maka strategi penyelesaian konflik ini bisa jadi contoh penyelesaian konflik lainnya dunia. Suatu kondisi analogi yang terjadi di Bojonegoro, melalui suatu diskusi dengan Walikota Bojonegoro di Jawa Timur tahun 2014 disimpulkan bahwa penyebab Aceh selalu bergejolak, melalui suatu hasil penelitian selama 8 tahun di Aceh ternyata suatu persoalan yang sama yaitu persoalan kesejahteraan di wilayah yang kaya akan sumber daya alam atau ibarat "ayam mati di lumbung padi". Melalui pembelajaran dari kasus di Aceh tersebut maka Walikota Bojonegoro mengambil suatu kebijakan dalam pemanfaatan kekayaan alamnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam hal semangat gotong-royong, dulu Aceh memiliki semangat tersebut, tetapi saat terjadi tsunami lalu terjadi dilaksanakan *recovery*, yang diikuti dengan masuknya banyak NGO. Apa yang dikerjakan oleh masyarakat, meskipun membersihkan halaman rumahnya sendiri, diberi imbalan berupa uang, saat itulah mereka merasa sudah benar seperti itu. Hal itu menyebabkan hilangnya nilai-nilai sukarela dan gotong royong karena segala sesuatunya dinilai dengan uang. Dengan kurun waktu yang cukup lama, NGO terlibat membangun Aceh kira-kira 5 tahun dengan melakukan rekonstruksi fisik. Begitu kuatnya pengaruh NGO saat itu karena situasi sangatlah darurat ibarat kondisi masyarakat sebagaimana anak ayam yang

tidak tahu dimana induknya lagi. Kekosongan pemimpin selama kurun waktu satu periode pemerintahan. Ada satu hal lagi yang cukup krusial yaitu saat konflik, disusul bencana tsunami, lalu terwujudlah perdamaian. Setelah itu masuklah narkoba. Gejala yang terjadi adalah, masyarakat kini terkontaminasi narkoba. Dulu ada penggunaan ganja untuk bumbu masak. Mungkin di Aceh tantangan terbesarnya adalah narkoba karena pada mulanya tidak ada dan kini terjadi. Disini pentingnya suatu kajian akademik, tentang pencegahan masuknya narkoba dan bagaimana memroteksi anak-anak sejak dini. Proses beredarnya narkoba diperkirakan mula-mula yang menggunakan narkoba adalah orang-orang kelas atas karena mahal, dengan cara menggunakannya di luar Aceh, kemudian menyebar sehingga lalu disini (di Aceh) pun harus ada. Selanjutnya meluas penggunaannya kini transaksinya melibatkan anak-anak kecil.

Wawancara dengan Danrem 011/Lilawangsa yang diwakili oleh Kasrem Letkol Inf. Sunardi Istanto

Dalam upaya pembinaan nilai-nilai kebangsaan adalah bagaimana membina karakter masyarakat Aceh yang cenderung malas. Sudah menjadi gejala umum, apabila masyarakat tinggal di daerah yang potensi alamnya banyak, maka mereka cenderung malas, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah, seperti menanam ganja. Selain itu TNI juga menjalin kerjasama dengan dinas pertanian, dengan program mencetak sawah dan sebagainya. Untuk mengurangi sifat malas mereka, maka dilakukan dengan mengubah karakter melalui keluarga kita, pendidikan dan pesantren. Disarankan untuk menambah wawasan, maka diupayakan untuk mengirim alumni pesantren guna belajar ke Jawa dan daerah lainnya, supaya ada wawasan dalam menuju suatu perubahan. Cara lain yang ditempuh adalah menyisir generasi muda (yang lahir pasca konflik), melalui Motor Pintar Babinsa, yang berisikan buku-

buku perpustakaan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan sebagainya.

Untuk ke depannya, konsep yang cocok dalam pembinaan nilai-nilai kebangsaan adalah pembinaan karakter, dan selama ini dilakukan oleh TNI dengan cara mendorong pemda, karena mereka memiliki anggaran. Prospek ke depan dalam kepemimpinan daerah seperti provinsi maupun kabupaten/kodya, selama ini yang sebagian besar dipegang oleh pemimpin eks-GAM tidak menunjukkan *progres* yang signifikan. Sehingga harapannya adalah agar ke depan dapat dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkualitas. Salah satunya adalah supaya animo masyarakat yang masuk TNI lebih besar agar dapat putra daerah tersebut untuk bisa membina keluarganya, dan sebaiknya setelah mereka selesai pendidikan jangan langsung berdinis disini, melainkan dinas di tempat lain sekitar 1 – 2 tahun, supaya mereka mendapatkan wawasan.

Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S.IK didampingi oleh Wakapolres, Komisaris Polisi Imam Asfali, S.IK.

Pada waktu sekarang ini ada dua hal yang mencuat memang pada generasi muda yaitu ekonomi, dan narkoba. Untuk narkoba kami bersepakat ingin memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Sebagai contoh telah tertangkap Kadis Perindag dan Ketua KIPP ditangkap gara-gara memakai narkoba merupakan komitmen pemberantasan narkoba. Persoalan narkoba sangat krusial karena masalah geografis, barang dari China, Thailand, Transit di pesisir timur sehingga barang-barang ini mudah masuk lewat pelabuhan-pelabuhan tikus (pelabuhan kecil). Beberapa kali penangkapan oleh BNN di wilayah pantai timur ratusan kg narkoba tersita. Selain itu narkoba ini kecil, masyarakat kita lebih dominan usaha narkoba, karena pasarnya jelas, pernah diungkap lahan ganja, dengan penyiraman mesin, pupuk NPK, mulai semai, besar hingga panen dalam satu area. Disarankan apakah tidak ada komoditi yang lebih baik,

karena masyarakat punya sistem tanam, sudah mengerti cara bertani, diharapkan masyarakat bisa bertani dengan komoditas lain selain narkoba dan selain diberikan bantuan seharusnya pemerintah menyiapkan wadah menampung hasil dari tanaman masyarakat jika tidak maka masyarakat kembali lagi.

Pembahasan

Nilai-nilai Kejuangan mengalami degradasi seiring dengan timbulnya konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh merupakan ketidakadilan: tidak sesuai antara kenyataan dengan pengharapan di berbagai bidang khususnya bidang pembangunan. Ini berdampak pada kemiskinan, kebodohan, dan tingkat keselamatan masyarakat yang rendah. Konflik ini muncul sejak diproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Pidie oleh GAM yang dipelopori oleh Muhammad Hasan Tiro. Pemberlakuan UU No.5/1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah yang membawa pada kedudukan Kepala Wilayah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat lebih dominan dibanding kedudukannya sebagai Kepala Daerah.

Dari sepuluh parameter Nilai Kejuangan dan Kebangsaan Masyarakat yang diamati dan diukur, maka tujuh parameter memperoleh skor antara Ragu-ragu dan Setuju dengan nilai rata-rata 0.743 atau mendekati nilai 8 (setuju) dan ada dua parameter dengan skor antara Setuju dan Sangat Setuju dengan Skor rata-rata 0.821 juga mendekati nilai 8 (Setuju). Sementara itu ada satu parameter dengan pertanyaan negatif dengan skor 0.376 dengan skor antara Ragu-ragu dan Tidak Setuju. Rata-rata keseluruhan parameter adalah 0.760 yang nilainya mendekati "Setuju". Hasil survei di atas menunjukkan bahwa pada umumnya nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat Aceh menuju pulih kembali. Hal tersebut tidak dapat dimungkiri merupakan buah dari Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani

oleh delegasi Republik dan perwakilan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005.

Dari 4 parameter Nilai Kejuangan dan 6 Parameter Nilai Kebangsaan dapat diambil masing-masing parameter yang paling paling berpengaruh pada nilai Kejuangan adalah Peduli Keamanan Lingkungan, Semangat Berkorban bagi Negara, Menumbuhkan Semangat Kejuangan. Dan faktor-faktor yang paling berpengaruh pada nilai Kebangsaan adalah Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah, Penghayatan Nilai Agama, Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Meinarno dan Mashoedi (2016) dari Prodi Psikologi Sosial, Universitas Indonesia yang membahas tentang hubungan antara nilai-nilai Pancasila dalam membentuk rasa kewarganegaraan pada remaja. Uji korelasi pearson menunjukkan adanya terdapat korelasi yang positif dan signifikan pada semua nilai Pancasila dan rasa kewarganegaraan, yaitu sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dengan demikian, semakin tinggi nilai Pancasila individu maka rasa kewargaannya ikut tinggi.

Dalam masyarakat Aceh ada tradisi masyarakat Aceh adalah mulai punah yaitu tradisi menginap di meunasah (mushalla/langgar). Tradisi ini turun temurun dipraktekkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada dua tujuan penting dari *meunasah* bagi masyarakat Aceh. Pertama, *meunasah* sebagai *cultural center* disebabkan karena pada setiap kampung (gampong) selalu ada meunasah. Malah, tidak bisa disebutkan sebagai sebuah gampong di Aceh jika tidak ada meunasah. Di semua tempat, ketika ada masalah dengan masyarakatnya, entah itu menyangkut problema sosial-kemasyarakatan, budaya, atau bahkan agama, selalu diselesaikan di meunasah tersebut. Kedua, *meunasah* sebagai *educational center* yang menyangkut dengan proses pendidikan anak-anak yang dimulai dari meunasah. Sengaja orang-orang masa dahulu mendirikan tempat pengajian di kawasan meunasah, agar

meunasah selalu hidup dan makmur, serta menjadi pemusatan konsentrasi aktivitas. Karena dengan belajar, manusia berkembang sebagai pribadi karena memiliki sesuatu. Sesuatu di sini dapat dimaknai sebagai kesejahteraan, yang ditunjukkan dengan akumulasi aset, pengelolaan utang yang tepat, proteksi, meningkatkan tabungan, dan cerdas mengelola pengeluaran. (Adzim & Ariwibowo, 2019)

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Mujib, Abdullah dan Nugroho (2014) yang membahas tentang wujud Aceh baru yang menjadi inspirasi kebangkitan lokal di Aceh. Dua hal penting yang akan mendukung bagaimana gagasan Aceh baru/kebangkitan Aceh dirumuskan dari dalam. Setidaknya penguatan ruang publik sebagai basis pengelolaan kearifan lokal menjadi wacana penting dalam mengukur indikator berlangsungnya kebangkitan lokal di Aceh. Studi ini menunjukkan bahwa reaktualisasi ruang-ruang publik yang selama ini tenggelam oleh karena konflik dan tsunami, Kearifan lokal wacananya sudah sampai penerapan kebijakan melalui qonun sebagai bentuk pemeliharaan warisan intelektual Aceh yang harus terus dihidupkan dan diimplementasikan sehingga belakangan ini di meunasah-meunasah, aktivitas-aktivitas gampong, menghidupkan mesjid sebagai pusat kajian islam, bahkan warung kopi pun menentukan arah identitas ke-Acehan yang sedang dibangun, terutama sebagai gagasan aceh bangkit

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan pembahasan sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sejatinya masyarakat Aceh sudah memiliki nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan yang secara intrinsik. Nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan tersebut telah bergelora sejak zaman kolonial dengan tokoh-tokoh pahlawannya yang gigih bertempur melawan penjajah lalu keikhlasannya dalam berkorban

mempertahankan kemerdekaan hingga terkenal dengan sebutan Aceh Daerah Modal. Nilai-nilai tersebut terkikis saat terjadinya konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah RI dan GAM hingga masyarakat Aceh. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan dari sepuluh parameter Nilai Kejuangan dan Kebangsaan diperoleh nilai rata-rata keseluruhan parameter adalah 0.760 yang bermakna mendekati nilai setuju (8) menunjukkan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan pulih kembali yang merupakan buah dari Perjanjian Perdamaian Helsinki. Tantangan selanjutnya adalah upaya merawat dan mengawal perdamaian yang membutuhkan peran serta semua elemen masyarakat terutama adalah untuk mengatasi persoalan kesejahteraan.

Dari uji regresi linier antara 4 parameter Nilai Kejuangan dan 6 Parameter Nilai Kebangsaan untuk mendapatkan parameter yang paling berpengaruh diperoleh masing-masing 3 parameter yang paling berpengaruh. Untuk tiga parameter yang paling berpengaruh pada nilai Kejuangan adalah Peduli Keamanan Lingkungan, Semangat Berkorban bagi Negara dan Menumbuhkan Semangat Kejuangan sedangkan tiga parameter yang paling berpengaruh pada nilai Kebangsaan adalah Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah, Penghayatan Nilai Agama dan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.

Upaya untuk menanamkan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan tersebut difokuskan pada pembinaan masing-masing tiga parameter Kejuangan dan Kebangsaan tersebut yang diwujudkan pada melalui tiga upaya utama. Upaya meningkatkan Kepedulian Keamanan Lingkungan melalui mengaktifkan lagi kegiatan siskamling dan peningkatan peran masyarakat terhadap kegiatan di pedesaan/kelurahan.

Upaya Menumbuhkan Semangat Kejuangan dan Berkorban bagi Negara melalui Penghayatan Nilai Agama melalui pemberdayaan Dayah (pesantren), Meunasah (Surau) dan budaya khas Aceh. Upaya untuk menumbuhkan Kesadaran

Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah melalui Penghayatan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa melalui kerjasama kelembagaan dalam bentuk kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti BPIP. Metode Edukasi melalui pendidikan kewargaan negara, dan peringatan hari-hari besar nasional dan melalui Metode Sosialisasi melalui media massa dan kegiatan kemasyarakatan.

Dari semua pembahasan dapat disusun saran-saran yang bertujuan untuk mendukung jawaban dari permasalahan antara lain untuk mendapatkan kajian yang lebih akurat maka area penelitian dapat diperluas lagi untuk wilayah-wilayah provinsi Aceh dengan sampling Area yang lebih luas dan jumlah area kabupaten/kota yang lebih banyak. Selain itu pula dibutuhkan asisten-asisten peneliti yang terdiri dari masyarakat sipil lokal. Hal itu karena status peneliti yang merupakan militer aktif sedikit banyak dapat menimbulkan bias atau distorsi pada responden.

Dari pembahasan dapat diketahui bahwa akar dari konflik Aceh adalah ketidakadilan yang bermuara pada kesejahteraan. Penyelesaian konflik tersebut ke depannya juga masih menyisakan persoalan ketidakadilan dan kesejahteraan. Persoalan ketidakadilan masih mewarnai penerapan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Karena itu perlunya as terjaminnya partisipasi politik bagi masyarakat Aceh, lahirnya pengaturan ekonomi secara lebih berkeadilan, serta adanya peraturan perundangan, tentang pengaturan kewenangan secara proporsional bagi institusi di Aceh, musti kembali diletakkan sebagai maksud daripada *Self Government* bagi Pemerintah Aceh.

Penanaman nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan masyarakat Aceh selama ini terutama mengandalkan TNI dan Polri sebagai penjurunya hal itu mengingat latar belakang konflik yang berkepanjangan yang pernah terjadi. Kondisi tersebut menuntut sinergi antara TNI dan Polri menjadi mutlak diperlukan. Peran pemimpin teritorial TNI dan Polri sangat



penting untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan masyarakat seperti pemberdayaan petani, dan nelayan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan kegiatan pencetakan sawah baru, pembinaan desa pesisir dan sebagainya.

PUSTAKA ACUAN

Al-Qardhawy, M. Yusuf, Adwani, M. Nur Rasyid. (2014). status hukum gerakan aceh merdeka dan memorandum of understanding helsinki menurut perspektif hukum internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2, No. 2, hal. 35-52

Ariwibowo, Prasetio. (2016). Fundamental Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics*. Volume 2 Nomor 3 Maret 2016, Page 232 – 245. DOI : <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/viewFile/1485/1188>.

Daly, P. dkk, (2012) *Aceh setelah Tsunami dan Konflik*, Pustaka Larasan, Jakarta, hal. 269

Daly, Patrick and dkk. (2012). *Aceh Pasca Tsunami dan Pasca Konflik*. KITLV-Jakarta.

Ikramatoun, Siti; Amin, Khairul. (2018). Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015). *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 89-110, june 2018. ISSN 2654-8143. Available at: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/ar>

<https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita>
[ticle/view/11869](#)>. Date accessed:
09 june 2021.

Meinarno, E. A dan S. F. Mashoedi. (2016), *Pembuktian Kekuatan Hubungan antara Nilai-Nilai Pancasila dengan Kewarganegaraan*, Prodi Psikologi Sosial, Universitas Indonesia Kota Depok, Jawa Barat

Mujib, I, I. Abdullah dan H. Nugroho, (2014), *Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh dari Dalam Reaktualisasi Ruang Publik bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik dan Tsunami*, Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 49-62.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang *Sistem Keamanan Lingkungan*. hal 2

Pitakasari, A.R. (2012). <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/04/07/m23dyb-target-2012-produksi-rumput-laut-capai-51-juta-ton>.

Staf Operasi Mabes TNI. (2014), *Wilayah Perbatasan Negara Indonesia*, Jakarta, h. 2.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang-Undang No. 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan.



Usman, Abdullah Sani. (2010). *Krisis Legitimasi Politik dalam Sejarah Pemerintahan di Aceh*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan

Wahbi, A.A & Ariwibowo, P. (2019). Konsep Literasi Ekonomi Digital: Analisa Dampak Teknologi Terhadap Prilaku Gaya Hidup Guru SMP Se Tangerang Selatan. Bogor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah*. (3)1, 37-44. doi : 10.30868/ad.v3i01.486.